

BAB I

PENDAHULUAN

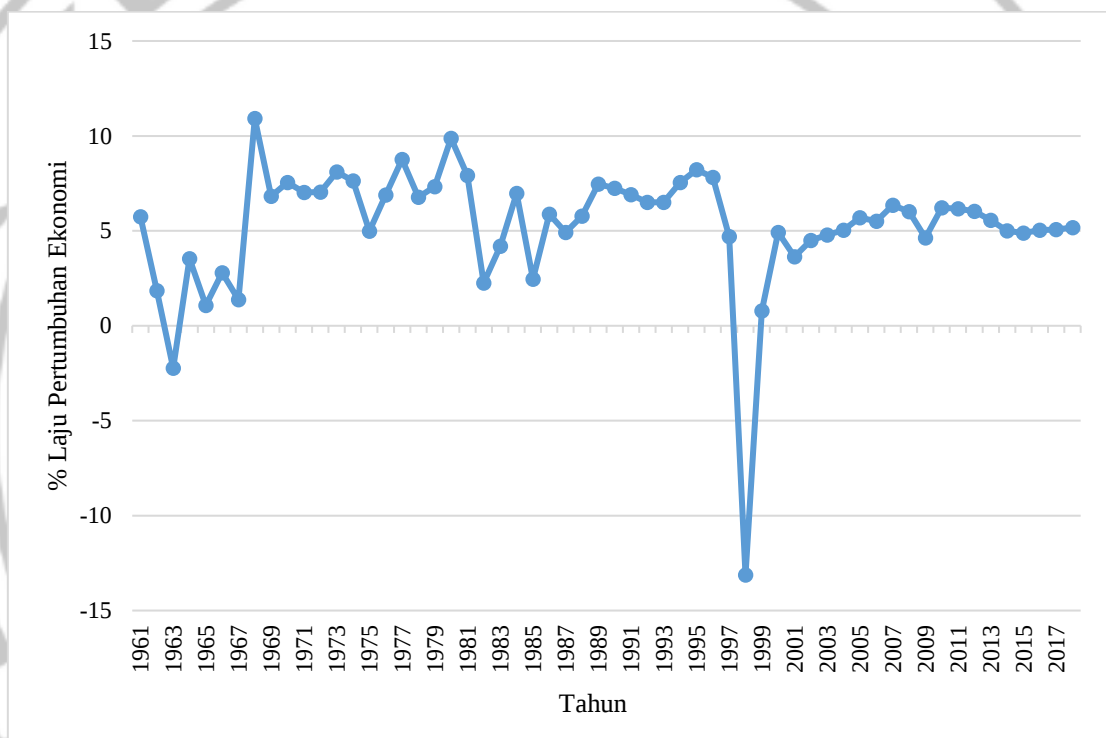
A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi salah satu tujuan utama dalam proses pembangunan ekonomi (Anwar, 2012). Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengimbangi peningkatan jumlah penduduk. Oleh sebab itu selain sebagai indikator kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi juga digunakan sebagai indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan dan untuk menentukan kebijakan arah pembangunan di masa yang akan datang.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Sukirno (2011) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan produksi barang dan jasa di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh satu negara dalam analisis makro diukur dengan PDB (Mankiw, 2007). Lubis (2014) juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara ditandai dan diukur dengan tingkat PDB, lebih lanjut Lubis (2014) menyatakan bahwa nilai PDB yang tinggi dapat diartikan bahwa kondisi perekonomian suatu negara tersebut juga baik.

PDB mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Setiap negara pada umumnya menginginkan pertumbuhan ekonomi yang pesat agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan. Namun Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan cepat.

Grafik 1.1 Presentase Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia



Sumber : World Bank (diolah)

Berdasarkan grafik 1.1 diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 1984-2018 terlihat fluktuatif. Pada periode 1993-1995 rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun sebesar 7,73%, akan tetapi akibat krisis moneter yang terjadi, laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurun drastis. Pada tahun 1997 tingkat pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,7% dan pada tahun 1998 perekonomian semakin terpuruk dengan laju pertumbuhan -13,1% kemudian pada tahun 1999 tingkat pertumbuhan tidak lagi negatif namun hanya mencapai 0,79%. Indonesia kemudian melakukan reformasi di bidang ekonomi dan mengubah paradigma kebijakan ekonomi

di Indonesia. Semenjak tahun 2000 perekonomian Indonesia mulai membaik. Pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4,92% dan antara tahun 2001-2013 rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,46%.

Menurut Todaro (2011) ada tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu akumulasi modal, termasuk semua investasi baru dalam tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan kerja; pertumbuhan populasi penduduk yang akan memengaruhi pertumbuhan tenaga kerja; dan perkembangan teknologi yang berhubungan dengan cara baru dalam menyelesaikan pekerjaan. Menteri keuangan melalui www.kompas.com (2018) menyampaikan selain melalui infrastruktur, dengan investasi pada modal manusia (*human capital*), termasuk dalam bidang pendidikan, akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja yang pada akhirnya akan mengakselerasi pertumbuhan perekonomian kemudian mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia.

Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan perekonomian Indonesia, Pemerintah perlu melakukan investasi. Menurut Mankiw (2007) investasi dapat berupa investasi modal fisik maupun investasi modal manusia. Selanjutnya Mankiw (2007) menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Pemerintah dapat melakukan investasi untuk memperbaiki kualitas modal manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah modal dasar bagi masyarakat untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2011).

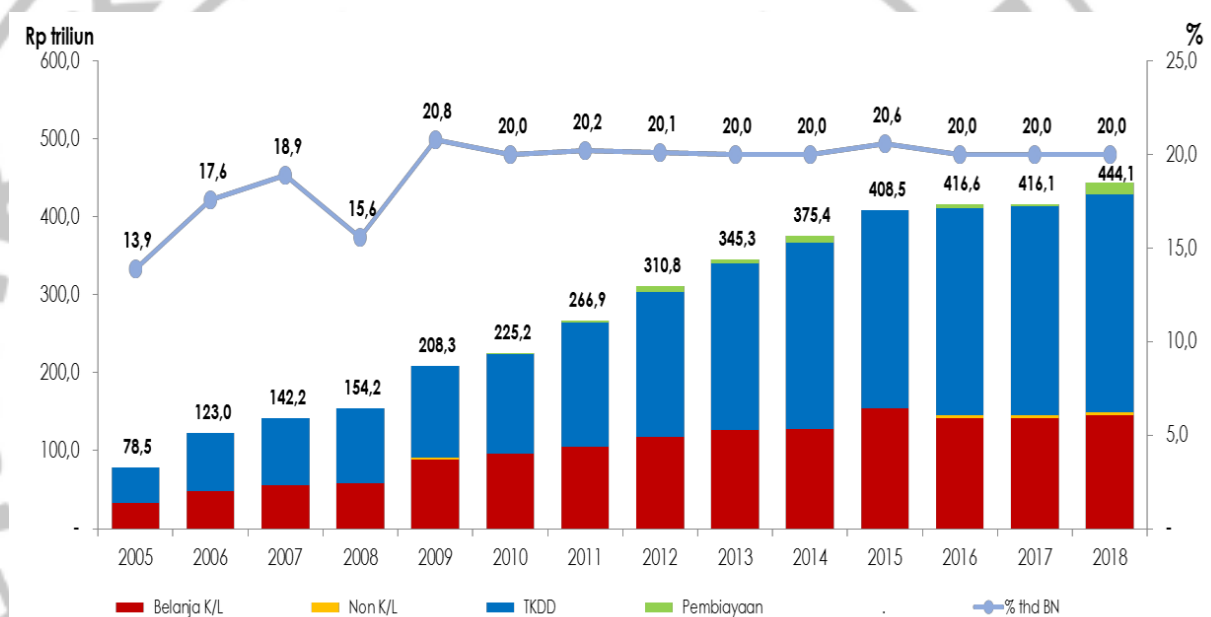
Investasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghasilkan ketersediaan modal manusia yang berkualitas dilakukan dengan mengalokasikan anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan. Belanja pada fungsi pendidikan dan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan,

dan kesehatan bagi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduk. Kemudian diikuti dengan terjaminnya keselamatan sosial masyarakat, meningkatnya tahap kesehatan, keharmonisan serta kesejahteraan yang berkelanjutan yang akhirnya dapat melangsungkan pertumbuhan ekonomi. Psacharopoulos dalam Todaro (2011) dalam penelitiannya di beberapa negara menyatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang positif terhadap promosi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kesehatan, pendidikan dan nutrisi tidak hanya mampu meningkatkan kapabilitas SDM saja, namun juga merupakan sarana penting dalam meningkatkan kualitas modal manusia di masa yang akan datang. Peningkatan pendidikan secara umum dapat pula memperbesar produktivitas dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi baik pada saat ini maupun masa yang akan datang.

Visi Indonesia 2045 sebagai negara maju dan negara perekonomian terbesar kelima di dunia, dapat dicapai salah satunya dengan penguatan SDM melalui pendidikan dan riset, program kesehatan, dan perlindungan sosial. Dalam Nota Keuangan 2020 disebutkan bahwa saat ini kualitas SDM Indonesia masih belum optimal, hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya tingkat pembelajaran siswa, rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta masih tingginya angka *stunting* di Indonesia. Oleh karena itu kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah berfokus salah satunya pada penguatan kualitas SDM. Untuk mewujudkan fokus tersebut maka dibuat program prioritas kualitas SDM yang kompatibel terhadap teknologi dan komunikasi. Untuk mewujudkan program tersebut Pemerintah berkomitmen untuk melakukan penguatan investasi pembangunan SDM terutama pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan. Komitmen tersebut ditunjukkan antara lain melalui pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dan anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN. Penguatan kualitas belanja di bidang pendidikan dan kesehatan terus dilakukan oleh Pemerintah agar pembangunan yang dilakukan berdampak signifikan dan berkelanjutan bagi perekonomian.

Pendidikan memegang peranan penting sebagai penentu kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Anggaran pendidikan dalam APBN telah dialokasikan minimal sebesar 20% terhadap belanja negara sebagaimana yang diamanatkan Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke-4 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Gambar 1.1 Alokasi Anggaran Pendidikan



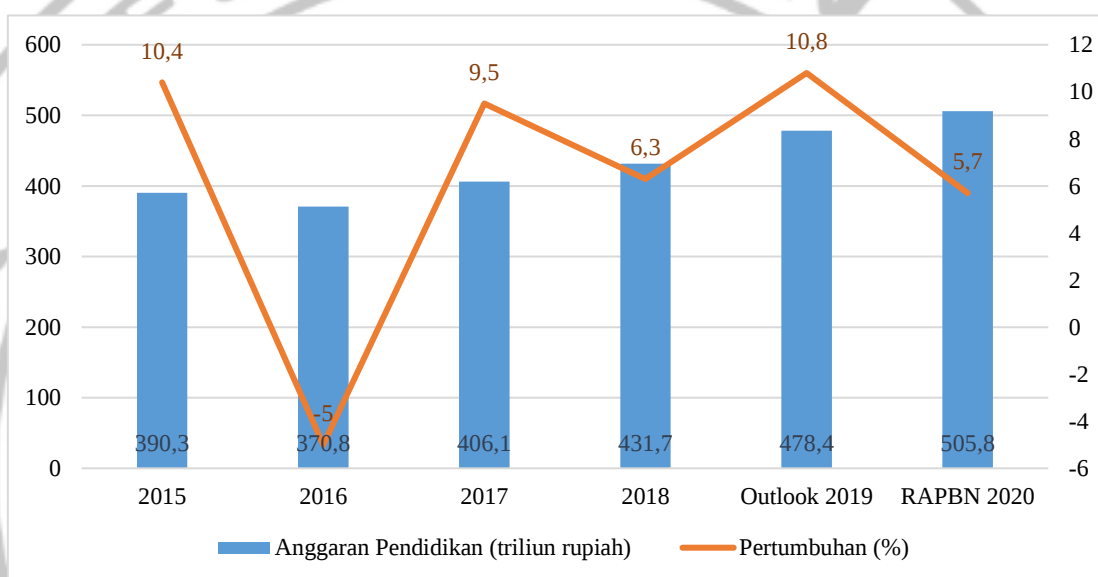
Sumber : Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

Sejak tahun 2009, anggaran bidang pendidikan telah secara konsisten dialokasikan minimal 20% seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Jumlah yang dialokasikan pada Transfer ke Daerah lebih besar dibanding yang dialokasikan ke K/L. Misalnya pada tahun 2018, 63% dialokasikan untuk transfer daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah pusat berkurang dan kewenangan pemerintah daerah semakin bertambah sebagaimana amanat UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pendidikan merupakan bagian dari urusan kewenangan pemerintah daerah. Sedang sisanya sebesar 34% dialokasikan pada belanja K/L yang dialokasikan pada Kementerian Agama, Kementerian Riset, Teknologi dan

Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian/Lembaga lain, dan Bendahara Umum Negara (BUN).

Anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam APBN terus meningkat dari Rp390.279,0 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp478.417,4 miliar pada tahun 2019. Anggaran pendidikan ini digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam pendidikan.

Grafik 1.2 Perkembangan Anggaran Pendidikan 2015-2020

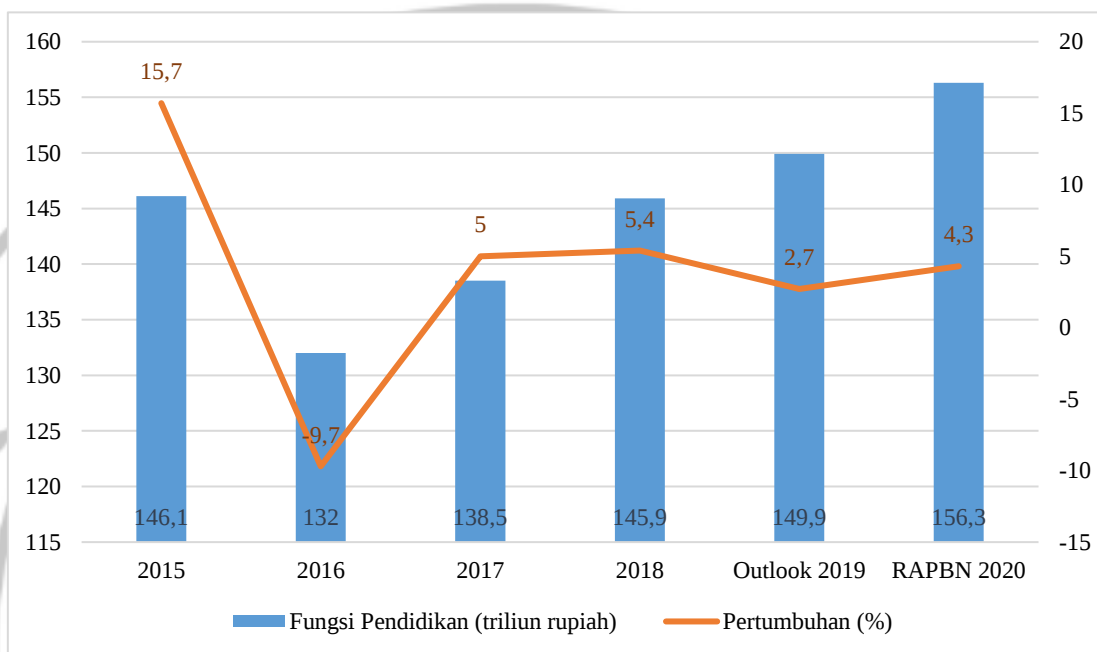


Sumber : Nota Keuangan TA 2020

Rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pada fungsi pendidikan dalam kurun waktu 2015–2019 adalah sebesar 0,6%, yaitu dari Rp146.134,8 miliar dalam tahun 2015 menjadi Rp149.877,5 miliar dalam outlook APBN tahun 2019. Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan strategis pada fungsi pendidikan antara lain penyaluran bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar yang dimulai sejak tahun 2015, realokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian/Lembaga (K/L) ke Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dimulai sejak tahun 2016, dan diserahkannya pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dimulai sejak tahun 2019. Kinerja realisasi anggaran fungsi pendidikan dalam periode tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan yang ditempuh oleh

Pemerintah berupa peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah serta pengembangan pendidikan vokasi.

Grafik 1.3 Perkembangan Belanja Fungsi Pendidikan



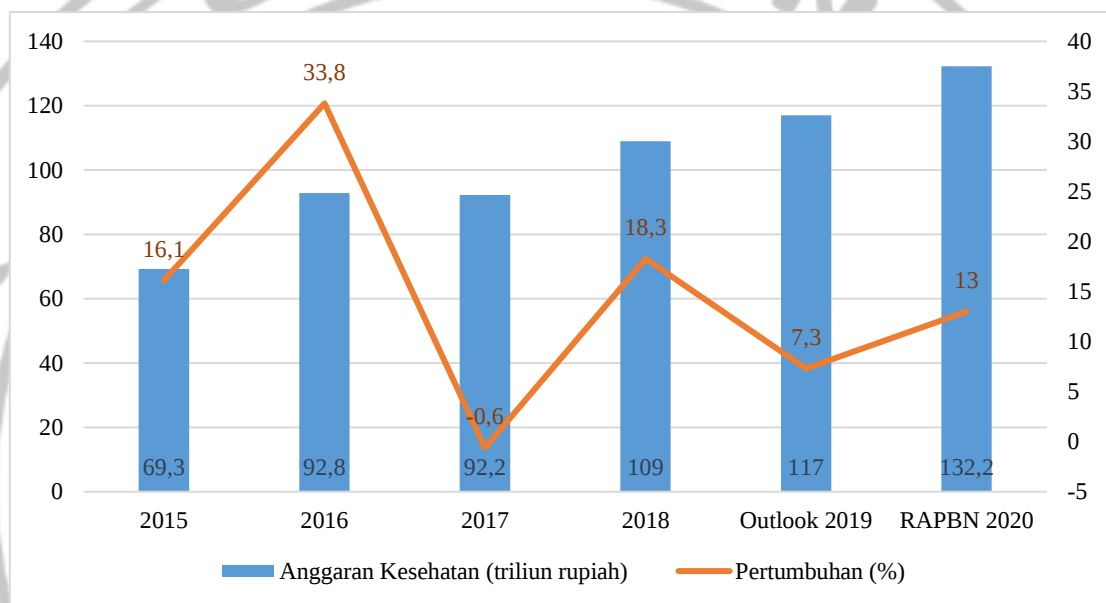
Sumber : Nota Keuangan TA 2020

Kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan tersebut merupakan upaya Pemerintah dalam memprioritaskan investasi sumber daya manusia. Upaya ini dilakukan melalui terobosan-terobosan kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia agar semakin kreatif, inovatif, produktif, berkualitas, memiliki daya saing, serta berkeahlian yang mampu bersaing di dunia internasional. Agar SDM Indonesia mampu bersaing dengan dunia internasional, Pemerintah menetapkan tema kebijakan fiskal yaitu APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM. Anggaran pendidikan harus fokus untuk meningkatkan keahlian (*skill*) dan pengetahuan untuk mempersiapkan tenaga kerja kita menghadapi era industri 4.0.

Selain dengan anggaran pendidikan, Pemerintah juga melakukan upaya peningkatan SDM melalui anggaran kesehatan. Untuk memenuhi amanat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah membuat kebijakan untuk pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara pada

APBN. Jumlah anggaran kesehatan pada periode tahun 2015-2019 terus meningkat, dan peningkatan paling tajam terjadi pada tahun 2016, di mana anggaran kesehatan tumbuh sebesar 33,8% dari tahun 2015. Peningkatan anggaran kesehatan secara garis besar ditujukan untuk memperkuat upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dalam rangka pembangunan SDM yang berkualitas.

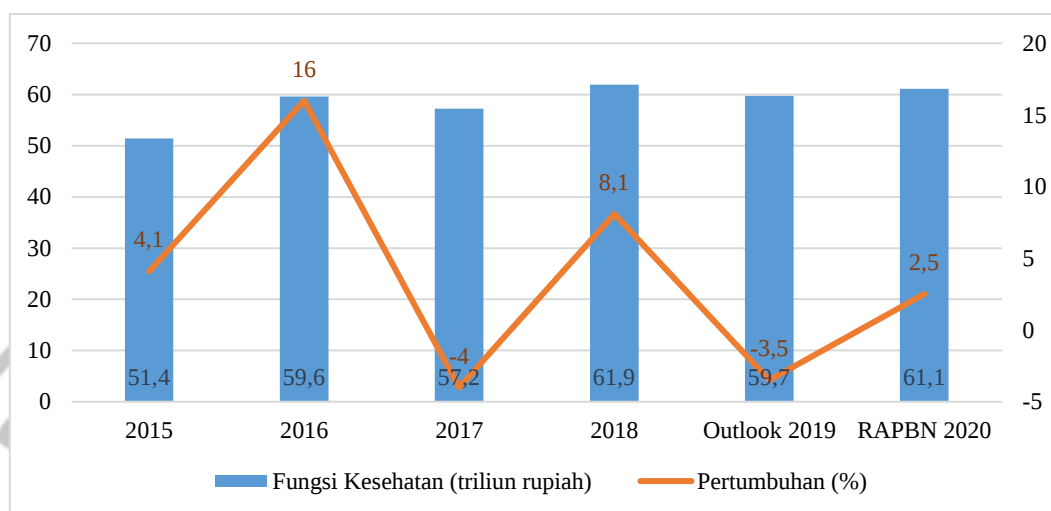
Grafik 1.4 Perkembangan Anggaran Kesehatan 2015-2020



Sumber : Nota Keuangan TA 2020

Rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pada fungsi kesehatan dalam kurun waktu 2015–2019 adalah sebesar 3,8% per tahun, yaitu dari Rp51.426,3 miliar pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp59.675,2 miliar pada outlook APBN tahun 2019. Peningkatan alokasi anggaran fungsi kesehatan tersebut terutama disebabkan oleh komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pemberian jaminan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu (Penerima Bantuan Iuran/PBI) dan pengalokasian anggaran kesehatan minimal 5% dari belanja negara yang dimulai pada tahun 2016. Anggaran fungsi kesehatan ini dilaksanakan oleh beberapa K/L terkait seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

Grafik 1.5 Perkembangan Belanja Fungsi Kesehatan 2015-2010



Sumber : Nota Keuangan TA 2020

Grafik 1.5 menunjukkan perkembangan belanja fungsi kesehatan tahun 2015-2020. Berdasarkan grafik 1.5 alokasi belanja fungsi kesehatan pada tahun 2020 sebesar Rp61.148,3 miliar, atau meningkat sebesar Rp1.473,1 miliar dibandingkan outlook APBN tahun 2019 sebesar Rp59.675,2 miliar. Besaran tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam pemenuhan alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 5%

Penelitian mengenai pengaruh antara belanja pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi banyak dilakukan. Anwar (2018) menyatakan bahwa kontribusi modal manusia sebagai penentu pertumbuhan pada level provinsi di Indonesia terbukti yang ditunjukkan oleh nilai positif variabel pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Anggraeni (2017) juga menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh secara positif terhadap PDB dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan yang berpengaruh positif terhadap PDB dalam jangka pendek dan jangka panjang. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Bastias (2010) yang menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dalam Nota Keuangan 2020, Pemerintah menjadikan anggaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai anggaran prioritas yang digunakan untuk mencapai visi Indonesia 2045. Alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan pengaruh dua variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu skripsi ini mengambil judul **“Pengaruh Belanja Pemerintah Pusat Fungsi Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”**. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti mengenai pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat menjadi salah satu referensi dalam mengelola belanja pemerintah pusat khususnya belanja fungsi pendidikan dan kesehatan.

B. Ruang Lingkup

Penelitian terkait belanja pemerintah pusat fungsi pendidikan dan kesehatan dengan pertumbuhan ekonomi memiliki cakupan yang cukup luas. Agar pembahasan yang ada dalam skripsi lebih fokus, maka ditetapkan ruang lingkup skripsi sebagai berikut.

- a. Belanja pemerintah pusat fungsi kesehatan yang dibahas adalah belanja K/L di bidang pelayanan kesehatan; dan kependudukan dan keluarga berencana tahun 2005 sampai dengan 2018.
- b. Belanja pemerintah pusat fungsi pendidikan yang dibahas adalah belanja K/L di bidang pendidikan dasar dan menengah; dan pendidikan tinggi tahun 2005 sampai dengan 2018.
- c. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2005 sampai dengan 2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup, dapat dirumuskan suatu masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah atas kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?

- b. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah atas pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah atas pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- b. Untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah atas kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari skripsi ini adalah sebagai berikut.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang terkait dengan APBN.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh belanja pemerintah fungsi pendidikan dan kesehatan terhadap upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi
- c. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk membantu pembaca dalam memahami dan mengikuti alur pembahasan yang ada dalam proposal penelitian ini. Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang pengambilan tema penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah pusat fungsi pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan, manfaat dan batasan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENELITIAN TERDAHULU

Bab ini berisi tentang landasan teori terkait topik penelitian, meliputi teori mengenai pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah pusat fungsi pendidikan dan kesehatan. Pada dasar teori ini juga terdapat kutipan-kutipan dari literatur yang dijadikan sebagai referensi dan penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian yang sedang dibahas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan metode penelitian yang digunakan, mencakup teknik pengumpulan data, pendekatan yang digunakan, teknik analisis dan alat analisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi hasil analisis data beserta interpretasinya dan paparan analisis atas pertanyaan penelitian.

BAB V : SIMPULAN

Berisi simpulan dari pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan, juga saran yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Keuangan dalam melakukan penyusunan anggaran belanja pemerintah pusat fungsi pendidikan dan kesehatan untuk periode mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam perekonomian di suatu negara. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek.

Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Ekonomi klasik merupakan kegiatan ekonomi yang didasari oleh pentingnya menyediakan seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam penerapan ekonomi klasik terlihat sangat sederhana sekali, yaitu bagaimana menggerakkan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Ekonomi modern muncul karena perkembangan zaman yang diikuti dengan perkembangan teknologi. Perubahan ini menyebabkan perubahan karakter dan perilaku masyarakat dalam melihat permasalahan ekonomi. Selain itu keterbatasan sumber daya produksi menjadi penyebab ketidakseimbangan dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, masalah inilah yang melahirkan pemikiran ekonomi modern. Dalam ekonomi modern sangat memperhatikan bagaimana perencanaan terhadap kegiatan produksi, perencanaan tersebut meliputi Jenis produk yang harus diciptakan, bagaimana cara atau

teknik produksinya, bagaimana pemerataan distribusinya, dan siapa pelaku dan penyerap hasil produksi.

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai “peningkatan jangka panjang dalam kapasitas untuk memasok barang-barang ekonomi yang semakin beragam kepada penduduknya, kapasitas yang berkembang ini didasarkan pada kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang dituntutnya”. Definisi ini memiliki tiga komponen yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi suatu negara diidentifikasi oleh peningkatan berkelanjutan dalam pasokan barang. Kedua, kemajuan teknologi adalah faktor permisif dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan pertumbuhan kapasitas dalam memasok beragam barang kepada penduduk. Dan yang ketiga, untuk penggunaan teknologi yang efisien dan luas serta perkembangannya, penyesuaian kelembagaan dan ideologis harus dilakukan untuk memengaruhi penggunaan inovasi yang dihasilkan oleh kemajuan pengetahuan manusia. Sebagai contoh, teknologi modern tidak sesuai dengan mode kehidupan pedesaan, pola keluarga yang besar dan luas, perusahaan keluarga dan buta huruf (Jhingan, 2014).

Boediono (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Terdapat tiga kata kunci dalam pengertian tersebut yaitu proses, *output* perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Hal ini menekankan pada aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Sedangkan menurut Adisasmita (2013) pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, yang diukur menggunakan PDB.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah model pembangunan tentang perkembangan belanja pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave. Model

yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave dalam Todaro (2011) menghubungkan perkembangan belanja pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut.

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, jumlah investasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap total investasi memiliki presentase yang cukup besar karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi yang dilakukan pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar negara dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap dibutuhkan dan masih cukup besar pada tahap menengah, karena peranan swasta yang semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antarsektor yang makin kompleks. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri akan menimbulkan semakin tingginya pencemaran atau polusi. Pemerintah harus turun tangan mengatur dan mengurangi dampak negatif dari polusi. Pemerintah juga harus melindungi buruh dalam meningkatkan kesejahteraannya. Musgrave (1980) dalam Sutriyono (2018) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap PDB semakin besar dan persentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil.

Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke belanja-belanja untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

3. Komponen Pertumbuhan Ekonomi

Todaro (2011) menyatakan bahwa sumber kemajuan ekonomi dapat ditelusuri ke berbagai faktor. Pada umumnya, investasi yang meningkatkan kualitas sumber daya

fisik dan manusia yang ada akan meningkatkan kuantitas sumber daya produktif dan meningkatkan produktivitas sumber daya. Penemuan, inovasi, dan kemajuan teknologi juga akan menjadi faktor utama dalam merangsang pertumbuhan ekonomi di sebuah negara.

Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harrod-Domar, Neoklasik, dari Solow, dan teori endogen oleh Romer, terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2011) yaitu:

- 1) Akumulasi modal, yang meliputi semua jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan SDM melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan kerja;
- 2) Pertumbuhan penduduk, yang akan memperbanyak jumlah tenaga kerja; dan
- 3) Kemajuan teknologi, yang dianggap sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting dan dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu kemajuan teknologi yang bersifat netral, kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja, dan kemajuan teknologi yang hemat modal.

B. Produk Domestik Bruto (PDB)

1. Pengertian PDB

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Menurut BPS salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu

sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

2. PDB Sebagai Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Retno (2012) menyatakan bahwa PDB diyakini sebagai indikator ekonomi terbaik dalam menilai perkembangan ekonomi suatu negara. Ada beberapa komponen pembentuk PDB yang dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi atau peningkatan PDB. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara harus dapat menciptakan situasi dan kondisi yang mampu membuat beberapa komponen yang dapat menjadi pemicu bagi peningkatan PDB, mencapai kondisi optimal sehingga pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dapat tercapai.

Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan PDB dan bukan indikator lainnya (seperti Produk Nasional Bruto) sebagai pertumbuhan. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Susanti et al (2007) tersebut adalah:

- 1) PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Hal ini berarti peningkatan PDB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.
- 2) PDB dihitung atas dasar konsep aliran (*flow concept*). Artinya perhitungan PDB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada satu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup nilai produk yang dihasilkan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran guna menghitung PDB, memungkinkan untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.
- 3) Batas wilayah perhitungan PDB adalah negara (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong perekonomian domestik.

C. Pengeluaran Pemerintah

1. Peran Pemerintah dalam Perekonomian

Studi terkait dengan peran pemerintah dalam perekonomian negara dikenal sebagai keuangan negara. Menurut Musgrave (1989) dalam DJA (2014), pemerintah memiliki 3 peran penting dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut.

- 1) Peran alokasi terkait dengan cara-cara yang dilakukan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal. Peran ini timbul sebagai akibat adanya kegagalan pasar terutama berkaitan dengan barang publik dan eksternalitas. Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam peran ini diantaranya adalah dengan penyediaan barang publik atau melalui instrumen pajak dan subsidi.
- 2) Peran distribusi berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan dalam masyarakat secara optimal. Kebijakan yang dijalankan pemerintah dapat berupa skema transfer langsung atau menggabungkan penerapan pajak progresif kepada rumah tangga berpenghasilan tinggi dan pemberian subsidi kepada rumah tangga berpenghasilan rendah.
- 3) Peran stabilisasi terkait dengan kebijakan pemerintah dalam rangka menjamin perekonomian tetap pada kondisi kesempatan kerja penuh (*full employment*) dengan harga yang stabil. Dalam keadaan ekonomi resesi, pemerintah menerapkan kebijakan anggaran ekspansif untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lesu. Sementara, ketika keadaan ekonomi sedang booming, pemerintah dapat menerapkan kebijakan pemotongan anggaran untuk memberi kesempatan pada sektor rumah tangga dan perusahaan menjadi penggerak perekonomian.

Berkaitan dengan perannya dalam keuangan negara, pada pertengahan tahun 2000-an, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai pengelolaan keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004), dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU 15/2004).

2. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah menurut Ilyas (1989) adalah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, pengeluaran tersebut bertujuan agar tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Soediyono (1992) pengeluaran konsumsi pemerintah yang biasa hanya disebut pengeluaran pemerintah, *government expenditure* atau *government purchase* meliputi semua pengeluaran dimana pemerintah secara langsung menerima balas jasanya. Sedangkan menurut Mankiw (2007) pengeluaran pemerintah merupakan pembelian barang dan/atau jasa oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dari beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk membiayai konsumsi pemerintah, kegiatan-kegiatan dan pengeluaran lainnya guna tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Jumlah pengeluaran pemerintah dalam suatu periode ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut (Sukirno, 2011).

- 1) Proyeksi jumlah pajak yang diterima. Pajak yang diterima oleh pemerintah merupakan sumber dana bagi pengeluaran pemerintah. Dalam menyusun anggaran belanjanya, pemerintah juga harus menyusun proyeksi pajak yang akan diterima. Semakin banyak pajak yang dapat dikumpulkan, semakin banyak pula pengeluaran pemerintah.
- 2) Tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Pemerintah memiliki beberapa tujuan penting terkait perannya dalam perekonomian negara. Tujuan-tujuan tersebut pada umumnya berupa mengurangi pengangguran dan kemiskinan, menghindari inflasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, pemerintah perlu untuk melakukan belanja misalnya untuk membangun infrastruktur, mengembangkan pendidikan, dan meningkatkan pelayanan umum.
- 3) Pertimbangan politik dan keamanan. Faktor ini merupakan salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja negara. Ketidakstabilan masyarakat dan kekacauan politik akan menyebabkan belanja pemerintah semakin besar, khususnya belanja pada sektor pertahanan dan keamanan.

3. Belanja Pemerintah Pusat Fungsi Pendidikan

Kebijakan belanja oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk menentukan arah perekonomian negara (DJA, 2014). Secara khusus, UU Keuangan Negara disahkan untuk mendorong pengelolaan keuangan secara hati-hati (*prudent*) dan bertanggung jawab. Salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan menyelaraskan belanja pemerintah pusat menurut klasifikasi fungsi, jenis belanja, dan organisasi (K/L) (DJA, 2014). Klasifikasi belanja menurut fungsi bertujuan untuk menunjukkan tujuan pembangunan ekonomi dan sosial yang ingin dicapai oleh pemerintah, sementara klasifikasi belanja menurut K/L dan jenis bertujuan untuk mencapai sebuah sistem administrasi dan pengawasan pelaksanaan belanja (DJA, 2014).

Penyusunan kebijakan belanja negara berdasarkan fungsi sudah dipraktikkan di berbagai negara di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) telah menetapkan klasifikasi belanja negara menurut fungsi yaitu *Classification of Functions of Governments* (COFOG). Klasifikasi belanja menurut fungsi dapat menjadi alat analisis yang andal karena menghasilkan pengelompokan yang stabil dan konsisten. Hal tersebut membuat data belanja dapat diperbandingkan antar waktu dan antar negara. Klasifikasi belanja menurut fungsi berdasarkan COFOG dikelompokkan menjadi 3 tingkat yang terdiri dari divisi, sub divisi, dan kelas. Pada tingkat divisi, belanja dikelompokkan menjadi 10 jenis yaitu (01) pelayanan umum, (02) pertahanan, (03) ketertiban dan keselamatan umum, (04) urusan ekonomi, (05) perlindungan lingkungan, (06) perumahan dan fasilitas masyarakat, (07) kesehatan, (08) rekreasi, budaya, dan agama, (09) pendidikan, dan (10) perlindungan sosial. (DJA, 2014).

Berdasarkan prinsip COFOG, pemerintah mengeluarkan UU Keuangan Negara yang mengatur pengelompokan anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi yang dapat dilihat pada pasal 11 ayat (5). Belanja diklasifikan dalam 11 fungsi yang menunjukkan aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pemerintah tersebut meliputi: (1)

pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial.

Realisasi anggaran fungsi pendidikan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat merupakan realisasi anggaran pada fungsi pendidikan untuk seluruh K/L, yang terdiri dari beberapa subfungsi, yaitu: subfungsi pendidikan anak usia dini (PAUD), subfungsi pendidikan dasar, subfungsi pendidikan menengah, subfungsi pendidikan nonformal dan formal, subfungsi pendidikan tinggi, subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan, subfungsi pendidikan keagamaan, subfungsi penelitian dan pengembangan pendidikan, dan subfungsi pendidikan lainnya.

Dalam Nota Keuangan TA 2020, disebutkan bahwa belanja fungsi pendidikan dalam jangka menengah diarahkan untuk beberapa hal, yaitu meningkatkan akses serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan, memperkuat pendidikan vokasi dan sinkronisasi kurikulum SMK (*link and match*), sinergi antarprogram yang dapat meningkatkan akses (BOS, PKH, PIP, KIP Kuliah, dan DPPN) untuk mencapai sustainable education, memperkuat kelembagaan dan tata kelola lembaga pengelola dana abadi investasi pemerintah di bidang pendidikan, mengaitkan komitmen dan kinerja pemenuhan mandatory spending bidang pendidikan oleh daerah dengan kriteria dalam pengaokasian DAU/DAK, dan peningkatan program budaya literasi masyarakat.

4. Belanja Pemerintah Pusat Fungsi Kesehatan

Realisasi anggaran pada fungsi kesehatan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan penyediaan layanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dalam Nota Keuangan TA 2020, disebutkan bahwa belanja fungsi kesehatan dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia; (2) peningkatan akses dan mutu terhadap pelayanan gizi masyarakat; (3) peningkatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (4) pengendalian kuantitas penduduk dengan meningkatkan akses dan

kualitas pelayanan KB yang merata; serta (5) peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan dan memantapkan pelaksanaan SJSN kesehatan baik dari sisi permintaan maupun penawaran guna mencapai pelayanan kesehatan semesta (*universal health coverage*).

Barro (1990) dan Devarajan et al. (1996) dalam Abdullah et al (2009) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sebagai komponen yang menentukan PDB. Dalam penelitian Abdullah et al (2009) di Malaysia yang berfokus pada pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah, sebagai alat ekonomi, secara praktis mungkin dan dapat efektif dalam mempengaruhi PDB per kapita riil.

D. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu terkait dengan belanja pemerintah pusat fungsi pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi cukup banyak diantaranya sebagai berikut.

1. Desi Dwi Bastias (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa hubungan pengeluaran pemerintah atas kesehatan di negara sedang berkembang seperti Indonesia dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah atas kesehatan belum dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan butuh waktu yang cukup lama untuk merasakan dampak yang dihasilkan dari pengeluaran tersebut dan rendahnya keefektifan anggaran pemerintah dalam realisasinya. Bastias (2010) juga menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan dalam jangka panjang tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut terjadi karena pengeluaran pemerintah atas pendidikan bersifat seperti investasi yang tidak dapat langsung memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bastias (2010) juga menyatakan bahwa jangka waktu penelitian yang terlalu pendek juga belum dapat mengakomodir pengaruh pengeluaran pemerintah atas pendidikan.
2. Donald N. Baum dan Shuanglin Lin (1993) dalam penelitiannya pada 58 negara Asia dan Afrika menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah atas kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian

tersebut dijelaskan bahwa untuk negara miskin dan sedang berkembang sifat pengeluaran pemerintah atas sektor publik bersifat konsumsi bukan investasi sehingga dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah atas kesehatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun pengeluaran pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Devarajan, S., Swaroop, V., dan Zou, H. (1996) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa semua pengeluaran produktif dalam bidang modal, transportasi dan komunikasi, kesehatan, dan pendidikan memiliki hubungan negatif atau tidak signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena pengeluaran yang tampaknya produktif mungkin tidak produktif jika jumlahnya terlalu banyak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah negara berkembang telah salah mengalokasikan pengeluaran publik demi pengeluaran modal dengan mengorbankan pengeluaran saat ini, dan negara-negara maju telah melakukan kebalikannya.
4. Dedi Setiadi (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki arah hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dan tidak signifikan. Hal ini dikarenakan karena proses perbaikan kesehatan masyarakat melalui pengeluaran pemerintah tersebut tidak dapat langsung terlihat pengaruhnya. Kemudian adanya inefektivitas anggaran pemerintah dalam realisasi dan tidak tepat sasaran menyebabkan pengeluaran di bidang kesehatan belum dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
5. Merlin Anggraeni (2017) menyatakan bahwa dalam jangka panjang maupun pendek pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan merupakan investasi tidak langsung yang diberikan pemerintah dalam meningkatkan kualitas modal manusia. Merlin Anggraeni (2017) juga menyatakan bahwa ada hubungan positif antara pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam penelitian tersebut juga dikatakan bahwa pengambilan kebijakan anggaran pendidikan minimal 20% yang dilakukan pemerintah akan membawa dampak

dalam jangka panjang. Artinya adalah apabila pemerintah terus mengoptimalkan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, maka dalam jangka panjang pengaruh tersebut akan menjadi faktor yang dapat meningkatkan PDB Indonesia.

6. Suparno (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa adanya hubungan pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi karena pemerintah memprioritaskan sektor pendidikan di mana pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melaksanakan amanat konstitusi yaitu anggaran dari APBN untuk pendidikan minimal 20% dapat terealisasi secara baik.
7. Daniel Landau (1986) dalam penelitiannya menyatakan bahwa belanja pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh negatif karena adanya inefisiensi sehingga ada korelasi yang lemah antara tingkat pengeluaran dan pendidikan aktual yang dihasilkan.
8. Esther Duflo (2001) meneliti hubungan pendidikan dan upah pada perkembangan sekolah dasar besar-besaran di Indonesia di bawah kepresidenan Soeharto antara tahun 1973 dan 1978, yang dikenal sebagai "SD Inpres". Penelitian tersebut menemukan bahwa pembangunan sekolah dasar menyebabkan peningkatan pendidikan dan pendapatan. Anak-anak Indonesia berusia 2 hingga 6 tahun 1974 menerima 0,12 hingga 0,19 tahun lebih banyak pendidikan untuk setiap sekolah yang dibangun per 1.000 anak di wilayah kelahiran mereka dan meningkatkan sebesar 12% kemungkinan bahwa anak yang terkena dampak akan menyelesaikan sekolah dasar. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa program menyebabkan kenaikan upah 3%-5,4%.

E. Kerangka Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh belanja pemerintah pusat fungsi pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) di Indonesia. Dalam penelitian ini, PDB bertindak sebagai variabel dependen, sedangkan belanja pemerintah pusat fungsi pendidikan yang dirinci menjadi belanja K/L di bidang pendidikan dasar dan menengah; dan pendidikan tinggi dan belanja pemerintah pusat fungsi kesehatan yang dirinci menjadi belanja K/L di bidang pelayanan kesehatan; dan kependudukan

dan keluarga berencana bertindak sebagai variabel independen. Kerangka penelitian dapat dilihat pada Bagan 2.1.

Bagan 2.1 Kerangka Model Penelitian



Sumber: Diolah dari data penelitian

F. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, pengaruh belanja pemerintah terhadap penanaman modal menghasilkan kesimpulan yang beragam. Oleh karena itu, perumusan hipotesis yang akan diuji untuk rumusan masalah adalah sebagai berikut:

H1 : Belanja pemerintah pusat fungsi pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2005-2018.

H2 : Belanja pemerintah pusat fungsi kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2005-2018.

H3 : Belanja pemerintah pusat fungsi pendidikan dan kesehatan secara simultan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2015-2018.